

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi komunikasi serta kemajuan ilmu pengetahuan diberbagai bidang seperti perusahaan, dan bidang pendidikan. Peran teknologi informasi telah membawa reformasi dalam perkembangan pendidikan yang harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia. Reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep ini memiliki nuansa bagaimana dunia pendidikan berusaha menggunakan perangkat komputer yang dapat di aplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja dunia pendidikan secara signifikan.

E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 mengamanatkan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan *E-goverment* di lingkungannya masing-masing. Sejalan dengan pengembangan *E-goverment* dan perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin canggih di era globalisasi ini, terknologi informasi dengan menggunakan komputer, telah menyederhanakan tugas menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar, dan dapat menjadi bantuan yang tak ternilai dalam manajemen sumber daya manusia.

Pada akhirnya dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Digital government merupakan pengembangan dari konsep e-government dengan lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data. *Digital Government* merupakan upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan mengintegrasikannya di dalam sektor publik. Di tengah perkembangan teknologi yang masif seperti *cloud computing, social media, mobile technology*, memberikan peluang bagi pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan layanan publik akan mengubah ekspektasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Paradigma pemerintah terhadap layanan publik telah bergeser dari mengantisipasi kebutuhan bisnis masyarakat (*citizen-centric approach*) ke menyesuaikan kebutuhan bisnis masyarakat melalui kemitraan dengan pemerintah (*citizen-driven approach*). Untuk itu, perlu dipastikan bahwa *Digital Government* bukan hanya sebatas melakukan digitalisasi layanan publik, tapi juga harus dapat diintegrasikan dengan proses bisnis dalam pelayanan publik.

Pemerintahan digital saat ini sudah banyak dikembangkan oleh pemerintahan di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang yang bertujuan untuk mempermudah layanan publik kepada masyarakat. Melalui penerapan pemerintahan digital di harapkan masyarakat dapat mengakses layanan-layanan publik dari mana saja, kapan saja dan melalui perangkat yang ada di genggamannya. Dengan demikian maka, pelayanan publik pemerintah dapat diakses selama 24 jam non-stop sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet.

Demikian pula halnya pengelolaan akreditasi sekolah/madrasah yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam non-stop baik oleh pihak sekolah/madrasah, asesor maupun BAN-S/M provinsi bali.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) sebagai satu-satunya lembaga negara yang ditugaskan untuk melakukan proses penilaian akreditasi bagi sekolah/madrasah di Indonesia sejak tahun 2017 telah mulai menggunakan aplikasi online untuk proses akreditasi sekolah/madrasah, dan benar-benar total menggunakan aplikasi online pada tahun 2018. Aplikasi yang dibuat oleh BAN-SM ini dinamakan Sispena S/M (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah). Pada aplikasi Sispena S/M seluruh data berkaitan dengan akreditasi di-unggah dan diisikan pada fitur-fitur aplikasi yang tersedia.

Sispena S/M dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) untuk mempermudah proses penilaian akreditasi sekolah dan menjamin transparansi penilaian serta kejujuran. Dengan sistem aplikasi on-line Sispena S/M diharapkan terjadi efisiensi besar-besaran khususnya dalam pengadaan dokumen-dokumen akreditasi. Sekolah/madrasah tidak perlu lagi mengirimkan bukti fisik dokumen akreditasi ke kantor BAN-SM provinsi bali, namun cukup mengisi daftar pertanyaan dan mengunggah dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP). Data-data yang berupa dokumen akan dikonfirmasi keberadaannya saat asesor (penilai) yang ditugaskan oleh BAN-SM provinsi bali melakukan visitasi (kunjungan lapangan) ke sekolah/madrasah yang menjadi sasaran akreditasi.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 22 yang menyatakan akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah Proses Penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan (Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018). Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah Badan Evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Pada pasal 1 ayat (2) Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada menteri.

Dalam mempermudah proses akreditasi sekolah/madrasha maka BAN-S/M menggunakan system berbasis web yaitu Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasha (Sispena-S/M). Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Untuk menerapkan *digital Government* ada beberapa komponen pendukung *digital government* yang diperlukan antara lain: *big data and knowledge management, cloud computing* dan pusat data, *cyber security*, manajemen informasi, layanan pelanggan, jaringan, serta dukungan teknologi *mobile* (Sulistio, 2019). Prasyarat ini harus dipenuhi bilamana pemerintah ingin dapat menerapkan konsep *Digital Government* secara maksimal. Persoalan utama dalam penerapan *Digital Government* pada umumnya adalah masalah teknis seperti server terganggu, listrik padam atau jaringan internet tidak tersedia dengan baik.

Meski teknologi digital ini memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dalam pelayanan publik, bukan berarti semua pihak mendukung diterapkannya *Digital Government* ini. Berbagai alasan dikemukakan untuk menolak penerapan *Digital Government* misalnya: jaringan internet yang tidak tersedia dengan baik, masyarakat tidak memiliki perangkat yang dibutuhkan, mahal, dan rumit dalam pelaksanaannya. Fakhoury dalam (Sulistio, 2019) mengungkapkan,

“In developing countries, demand for e-services is lacking, both inside and outside the government. External demand from citizens is often silenced by popular cynicism about the public sector, and by inadequate channels for communicating demand. As a result, public sector leaders

feel too little pressure from citizens for change”. Designing and managing a digital government program also requires a high level of administrative capacity. But developing countries most in need of digital government are also the ones with the least capacity to manage the process, thus creating a risk of “administrative overload”.

Dalam pandangan Fakhoury, disamping perlunya tuntutan masyarakat untuk menerapkan aplikasi pemerintahan digital, dibutuhkan juga kapasitas administratif yang tinggi dari personalia pemerintah, setidaknya kapasitas dalam hal mengelola proses. BAN-SM sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan aplikasi online dalam proses akreditasi sekolah/madrasah. Seluruh proses akreditasi, mulai dari pengisian data isian akreditasi (DIA), *audit data*, *mapping* asesor, penugasan asesor, validasi dan verifikasi hasil akreditasi hingga penerbitan sertifikat akreditasi telah menggunakan sistem online tersebut.

Sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Karakteristik dari sebuah sistem terdiri dari *input*, proses, dan *output* (Tata Sutabri, 2012). Sispena-S/M sebagai sistem tersusun dari komponen tersebut, dimana *output* sangat berpengaruh oleh proses serta inputannya. Sispena-S/M sebagai sebuah sistem akan menghasilkan *output* yang baik, jika *input* dan proses berjalan dengan baik.

Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah atau lebih dikenal dengan Sispena-S/M karena pertama kali dimplementasikan pada tahun 2017 merupakan suatu Sistem yang berbentuk sebuah aplikasi berbasis web yang pengelolaannya diawasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Aplikasi

ini tidak hanya bisa diakses oleh satu pihak saja dalam hal ini sekolah/madrasah. *User* atau pengguna dari aplikasi ini dibagi menjadi empat tingkatan yaitu tingkatan pertama adalah pihak sekolah, Semua sekolah yang terdaftar di kemendikbud bisa dan wajib menjadi user dan mengunggah informasi terkait sekolahnya agar bisa sesuai dengan standar nasional, tingkatan kedua adalah Asesor, tingkatan ketiga adalah BAN-S/M Provinsi, dan tingkatan keempat yaitu yang memiliki akses penuh adalah Admin BAN-S/M.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal dengan ketua BAN-S/M Provinsi Bali bapak Prof.Dr. I Wayan Maba dan TIM IT provinsi bali bapak I Made Wirajaya, S.Kom dan Ibu Ika Candra Mahayani pada hari rabu 29 juni 2022 mengatakan dalam mengoptimalkan Sispena S/M dalam proses akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M provinsi bali selalu melakukan sosialisasi kepada Sekolah/madrasha yang menjadi sasaran akreditasi. Sasaran akreditasi sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat. Sasaran akreditasi dibagi menjadi sasaran prioritas akreditasi sekolah/madrasah yaitu sekolah/madrasah yang bersatus belum terakreditasi (BT) dan yang tidak terakreditasi (TT) serta sasaran reakreditasi atau sekolah/madrasah yang sertifikat akreditasinya habis dan harus diakreditasi

kembali berdasarkan hasil keluaran *dashboard monitoring system* sesuai dengan prosedur operasional sistem (POS) BAN-S/M.

Adapun sasaran akreditasi tahun 2022 badan akreditasi nasional sekolah/madrasah provinsi bali terdiri dari sasaran prioritas yaitu sekolah/madrasah yang belum pernah diakreditasi yang telah memenuhi syarat dan sekolah/madrasah yang berstatus tidak terakreditasi (TT) serta sasaran reakreditasi atau akreditasi ulang untuk sekolah/madrasah yang sertifikat akreditasinya habis ditahun 2022. Adapun sebaran data sasaran akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M provinsi bali sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sasaran Prioritas BAN-S/M Provinsi Bali Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	SMK/ MAK	SLB	Jumlah
1	Kab. Badung	1	1	0	1	0	3
2	Kab. Bangli	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Jembrana	0	1	0	0	0	1
6	Kab. Klungkung	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Karangasem	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Tabanan	0	0	0	0	0	0
9	Kot. Denpasar	2	1	0	1	0	4
Total		3	3	0	2	0	8

Sumber: (Data BAN-S/M Provinsi Bali)

Berdasarkan table 1.1 sasaran prioritas BAN-S/M provinsi bali sebanyak 8 sekolah/madrasah yang terdiri dari 3 SD/MI, 3 SMP/MTS, dan 2 SMK/MAK yang menjadi sasaran prioritas untuk divisistasi. Adapun sasaran reakreditasi atau akreditasi ulang sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sasaran Reakreditasi BAN-S/M Proinsi Bali Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA /MA	SMK/ MAK	SLB	Jumlah
1	Kab. Badung	125	24	6	13	0	168
2	Kab. Bangli	57	4	4	4	0	69
3	Kab. Buleleng	129	35	16	8	0	188
4	Kab. Gianyar	140	13	4	12	0	169
5	Kab. Jembrana	63	14	5	4	0	86
6	Kab. Klungkung	42	7	5	5	0	59
7	Kab. Karangasem	42	7	4	4	0	57
8	Kab. Tabanan	110	17	7	6	0	140
9	Kota Denpasar	75	19	12	13	0	119
Total		783	140	63	69	0	1055

Sumber: (Data BAN-S/M Provinsi Bali)

Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrsh yang dituangkan dalam surat keputusan ketua badan akreditasi nasional sekolah/madrasah nomor; 191/BAN-SM/SK/2022 tentang penetapan perubahan kuota visitasi sekolah/madrasah tahun 2022 dimana kuota visitasi sekolah/madrasah BAN-S/M Provinsi Bali sebanyak 233 sekolah/madrasah yang terdiri dari 8 Sekolah/madrasah sasaran prioritas atau belum terakreditasi (BT) dan 225 Sekolah/madrasah yang reakreditasi atau akreditasi ulang. Adapun sasaran akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M provinsi bali sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Sasaran Visistasi BAN-S/M Proinsi Bali Tahun 2022

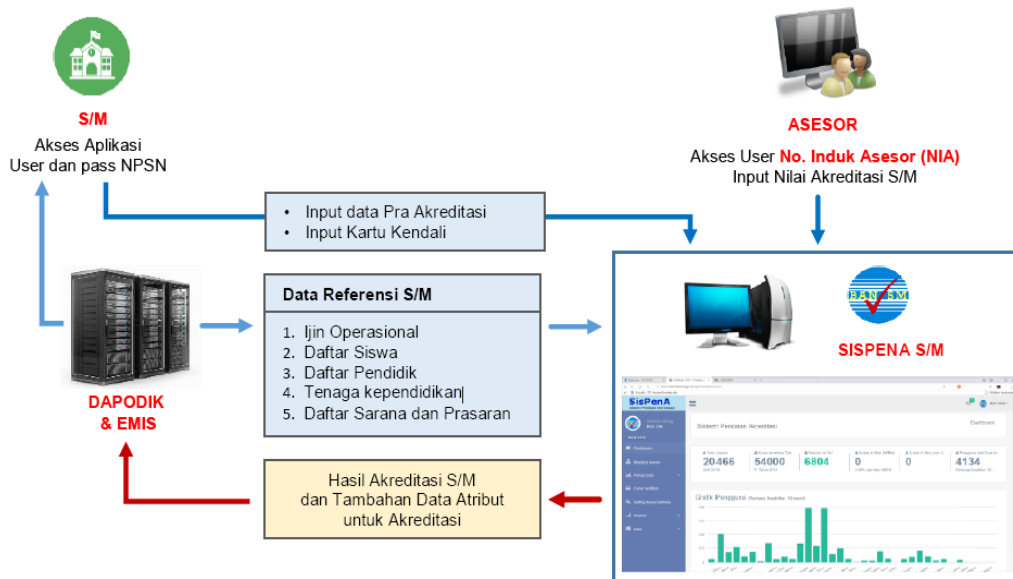
No	Kabupaten/Kota	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	SMK/ MAK	SLB	Jumlah
1	Kab. Badung	20	7	2	7	0	36
2	Kab. Bangli	18	6	0	1	0	25
3	Kab. Buleleng	22	3	4	5	0	34
4	Kab. Gianyar	12	6	0	1	0	19
5	Kab. Jembrana	16	9	3	1	0	29
6	Kab. Klungkung	15	2	2	1	0	20

No	Kabupaten/Kota	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	SMK/ MAK	SLB	Jumlah
7	Kab. Karangasem	16	4	5	0	0	25
8	Kab. Tabanan	10	2	0	1	0	13
9	Kot. Denpasar	16	6	2	8	0	32
Total		145	45	18	25	0	233

Sumber: (Data BAN-S/M Provinsi Bali)

Berdasarkan tabel 1.3 kuota sasaran BAN-S/M Provinsi Bali sebanyak 335 sekolah/madrasah yang nantinya akan di *visitasi* oleh Asesor (penilai) yang ditugaskan oleh BAN-S/M provinsi bali. Asesor BAN-S/M provinsi Bali terdiri dari Asesor Jenjang dan Asesor lintas Jenjang adapun jumlah asesor BAN-S/M provinsi Bali sebanyak 81 orang asesor, dari 81 orang asesor yang lulus pelatihan pengembangan diri asesor (PPDA) tahun 2022 sebanyak 71 orang asesor jadi sebanyak 71 asesor akan melakukan penilaian kepada sekolah/madrasah yang menjadi sasaran *visitasi* dan mengimput hasil *visitasi* di Sispena S/M.

Melalui perencanaan terstruktur dan berkelanjutan BAN-S/M mengembangkan dan melengkapi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M) dalam bentuk aplikasi berbasis *Web responsive* yang sudah terintegrasi dengan *database* Dapodik dan Emis seperti gambar berikut.



Gambar 1. 1 Program Sispena S/M
(Sumber: Materi Rakornas BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi, 2022)

Adapun alur program sispena S/M yaitu (1) sekolah/madrasha hasil keluaran *dashboard monitoring system* akan menjadi sasaran akreditasi dan nama sekolah yang menjadi sasaran akreditasi masuk kedalam sispena-S/M. (2) sekolah/madrasha yang menjadi sasaran akreditasi mengakses sispena-s/m menggunakan NPSN dan mengimput Data Isian Akreditasi (DIA), Upload Dokumen, serta Input Kartu Kendali; (3) Asesor mengakses sispena-s/m menggunakan Nomor Induk Asesor (NIA) untuk melakukan penilaian kinerja sekolah yaitu *asesment* kecukupan, input nilai *visitasi*, dan *validasi* hasil *visitasi*; (4) BAN-S/M Provinsi memverifikasi hasil validasi; (5) BAN-S/M melakukan pleno penetapan, pengumuman dan penerbitan E-Sertifikat; (6) hasil akreditasi S/M masuk kedashboard moditoring, dan informasi hasil akreditasi akan diberikan

ke masyarakat umum, serta sekolah bisa mendownload *E-sertifikat* akreditasinya melalui Sispena-S/M.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penerapan penggunaan Sispena-S/M masih terdapat kendala dalam penggunaan Sispena-S/M seperti data *indek* pemenuhan mutlak (IPM) saat dilakukan penarikan data masih keterangan tidak ada atau berwarna merah di Sispena-S/M hal ini mengharuskan sekolah/madrasah untuk meng-update data sekolah/madrasah di dapodik untuk sekolah dan di emis untuk madrasah, kurangnya pemahaman sekolah/madrasah terkait instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP), banyak dokumen yang diminta dalam IASP tidak dimiliki oleh sekolah, ukuran file unggahan dokumen sekolah pada daftar isian Akreditasi (DIA) maksimal 2 MB, tidak dapat mengunggah file berupa *word* dan *excel*, terkadang gangguan sistem membuat unggahan dokumen tidak sama dengan data yang masuk ke sistem pusat, dan kesalahan kirim *file* unggahan tidak pada nomor unggahan, akses internet yang susah terutama untuk sekolah/madrasah yang berlokasi di pelosok, terdapat ketidaksesuaian data yang ada di akun Sispena-S/M sekolah dengan akun penilaian asesor, dan sosialisasi terkait Sispena S/M hanya untuk sekolah/madrasah yang menjadi sasaran kuota akreditasi sehingga tidak semua sekolah/madrasah dibali mendapatkan informasi terkait penggunaan Sispena S/M

Kondisi ideal yang diharapkan dari implementasi Sispena S/M dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah menurut ketua BAN-S/M Provinsi Bali Bapak Prof. Dr. Wayan Maba dalam wawancara dan observasi awal ialah dengan

implementasi Sispena S/M dalam proses akreditasi diharapkan terjadi efisiensi besar-besaran khususnya dalam pengadaan dokumen-dokumen akreditasi, Sekolah/madrasah tidak perlu lagi mengirimkan bukti fisik dokumen akreditasi ke kantor BAN-SM provinsi bali cukup hanya mengisi daftar pertanyaan dan mengunggah dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP), sekolah/madrasah bisa mengunggah dari berbagai perangkat komputer atau handphone dengan satu akun sekolah/madrasah bisa dikerjakan dimana saja selama koneksi langsung dengan internet. Mempermudah asesor mengecek kelengkapan dokumen sekolah/madrasah sebelum melakukan visitasi ke sekolah/madrasah yang menjadi sasaran akreditasi, dan mempermudah BAN-S/M Provinsi Bali dalam menyusun rekomendasi hasil akreditasi untuk dinas pendidikan provinsi bali, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi bali, balai penjaminan mutu pendidikan provinsi bali, Disdikpora Kabupaten/kota se-bali, Kemenag Kabupaten/kota se-bali, dan pemangku kepentingan lainnya demi meningkatkan mutu pendidikan di bali. Sistem akreditasi yang baik akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik dan berkualitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh eko budi sulistio yang berjudul implementasi *digital government* dalam bidang pendidikan (studi tentang sistem penilaian akreditasi berbasis online pada badan akreditasi sekolah/madrasah provinsi lampung tahun 2019) dengan hasil penelitian bahwa kendala dalam penerapan Sispena S/M di provinsi lampung ialah sekolah/madrasah tidak melengkapi kelengkapan akreditasi, data sekolah/madrasah sasaran belum terakreditasi (BT) tidak valid, pelaksanaan sistem akreditasi online

adalah tidak tersedia atau lemahnya jaringan internet di sekitar sekolah/madrasah yang divisitasi. Selain itu juga kemampuan menggunakan teknologi informasi beberapa asesor masih lemah. serta dukungan dari dinas pendidikan dan kementerian agama setempat juga belum maksimal.

Hasil wawancara dan observasi awal dengan TIM IT BAN-S/M provinsi bali mengatakan bahwa Sispna S/M telah mengalami perkembangan terutama dibagian *server* penyimpanan yang lebih besar, Sispna-S/M tahun 2020 sampai sekarang mengalami perubahan dimana pada tahun 2017-2019 Sispna-S/M masih menggunakan delapan standar nasional pendidikan dimana sekolah hanya memilih level dan dokumen akreditasi terkait delapan standar nasional pendidikan di kumpulkan ke kantor BAN-S/M provinsi bali. Pada tahun 2020 sampai sekarang ialah instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) yang mencakup empat komponen yaitu komponen mutu lulusan, komponen mutu guru, komponen proses pembelajaran, dan komponen manajemen sekolah/madrasah. Seiring berjalannya waktu BAN-S/M provinsi bali selalu melakukan inovasi terkait implementasi Sispna S/M dalam proses akreditasi untuk mencapai hasil akreditasi yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik meneliti tentang “Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah di BAN-S/M Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Wujud *Digital Government* Dalam Bidang Pendidikan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun masalah yang muncul terkait penerapan implementasi sistem penilaian akreditasi sekolah/madrasah di ban-s/m provinsi bali tahun 2022 sebagai wujud *digital government* dalam bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan BAN-S/M Provinsi Bali terkait penggunaan Sispena S/M perlu ditingkatkan
2. Sekolah/madrasah tidak mengupdate data sekolah di Dapodik dan data madrasah di Emis.
3. Kurangnya pemahaman sekolah/madrasah terkait instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) dan banyak dokumen yang diminta dalam daftar isian akreditasi (DIA) tidak dimiliki sekolah/madrasah.
4. Terdapat ketidaksesuaian data di akun Sispena-S/M sekolah madrasah dan akun asesor.
5. Ukuran file unggahan maksimal 2 MB dan tidak dapat mengunggah file berupa word dan excel.
6. Koneksi internet yang tidak stabil terutama untuk sekolah/madrasah yang berada di daerah terpencil
7. Gangguan sistem membuat unggahan dokumen tidak sinkron dengan data yang masuk ke sistem pusat dan kesalahan kirim file unggahan tidak pada nomor unggahan.
8. Asesor lupa menentukan level kinerja ketika menyusun rekomendasi di Sispena S/M

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah di BAN-S/M Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Wujud *Digital Government* Dalam Bidang Pendidikan dilihat dari variabel *Input*, Proses dan *Output*?
2. Apakah manfaat dan hambatan dalam Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah di BAN-S/M Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Wujud *Digital Government* Dalam Bidang Pendidikan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Menganalisis Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah di BAN-S/M Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Wujud *Digital Government* Dalam Bidang Pendidikan dilihat dari variabel *Input*, Proses dan *Output*
2. Untuk mengetahui manfaat dan hambatan Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah di BAN-S/M Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Wujud *Digital Government* Dalam Bidang Pendidikan

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan dalam bidang layanan administrasi khususnya mengenai layanan administrasi secara online yang berhubungan dengan layanan administrasi akademik. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem penilaian pelayanan yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Pihak terkait dengan adanya Implementasi pengelolaan dalam pelaksanaan kebijakan Sispna S/M dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan suatu kebijakan lebih baik.

